



Jurnal Ekonomi

Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara

TH. V / 02 / 2000

ISSN : 0854 - 9842

Daftar Isi

Strengthening Economic Relations Between Indonesia and Gulf Cooperation Council Countries

Carunia Mulya Firdausy

Analisis Struktur Inflasi Indonesia (Studi Kasus Kebijakan Inflasi Masa Orde Baru)

Sawidji Widodoatmodjo

Analisis Faktor Terhadap Penyimpangan Keuangan Negara Tahun 1999/2000 (Dengan Pendekatan *Component Analysis*)

Budi Manggala

Pentingnya Prediksi Pergerakan Mata Uang Asing Dalam Perdagangan Internasional

Elvi Anggraini Tjandra

Kelangsungan BBM Dalam Masa Reformasi

Ronnie Resdianto Masman

Keefektifan Perpajakan Sebagai Sumber Penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia Tahun 2000 (Dengan Pendekatan Model *Wilcoxon*)

Caroline Heryanto Thio

Pengangguran dan Setengah Pengangguran Akibat Krisis Moneter di Perkotaan 1997-1999

Iwan Prasodjo

Modal Ventura Sebagai sumber Pembiayaan Alternatif Bagi Perusahaan di Indonesia

Herman Juwono

Industri Sepatu Dalam Analisis *Swot*

Hendro Lukman

ANALISIS FAKTOR TERHADAP PENYIMPANGAN KEUANGAN NEGARA TAHUN 1999/2000 (DENGAN PENDEKATAN *COMPONENT ANALYSIS*)

Budi Manggala*

Abstract

From the Audit Report for the fiscal year 1999/2000, it has been found out some discrepancies in the government finance for as much as Rp.165,850 billion by The Supreme Audit Board (SAB).

The SAB put these discrepancies in three categories, which are: (1) obedience to the rules; (2) economizing and efficiency on the government finance; and (3) effectiveness on achieving the goal.

The purpose of this article is to have factor analysis by using component model to determine the significance, correlation, and multicollinerities among these discrepancies on government finance.

Permasalahan

Hasil laporan semester I Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kepada Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 26 oktober 2000, membuat orang terhenyak dan mengelus dada. Nilai penyimpangan penggunaan anggaran yang mencapai Rp.165.850 trilyun atau 70,93 persen dari total realisasi anggaran Rp.233.816 trilyun, merupakan suatu nilai yang sangat luar biasa besarnya. Itu baru untuk tahun anggaran 1999/2000. Untuk enam bulan pertama anggaran tahun 2000-April hingga September-ternyata persentasenya tidak menjadi lebih kecil. Laporan BPK menunjukkan adanya penyimpangan pengelolaan keuangan negara sebesar 66,31 persen, yakni Rp.16.486 trilyun dari total realisasi anggaran sebesar Rp.24.859 trilyun.

Secara kronologis, ketika tahun 1993 Sumitro Djojohadikusumo melontarkan perkiraan tingkat kebocoran anggaran negara yang mencapai angka 30 persen, maka hal tersebut kurang ditanggapi oleh pemerintahan Orde Baru di bawah presiden Soeharto. Kalau kemudian pemerintahan Orde Baru harus jatuh, salah satu penyebab utamanya adalah faktor korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang dilakukan pejabat negara ketika itu. Digantikan oleh pemerintahan BJ Habibie, ternyata kasus KKN tidak menjadi surut. Hal tersebut didukung oleh laporan Ketua BPK, Satrio B. Joedono yang mengatakan bahwa tingginya persentase penyimpangan penggunaan anggaran untuk tahun 1999/2000 adalah akibat temuan dari penyimpangan penggunaan dana bantuan likuiditas bank Indonesia (BLBI) yang *notabene* dikucurkan semasa pemerintahan BJ. Habibie. Penyimpangan, salah urus dan korupsi ternyata juga terjadi pada pemerintahan Gus Dur dengan Kabinet Pembangunan Nasional yang lebih reformis. Dalam waktu enam bulan sejak April hingga September 2000, BPK telah menemukan 545 kasus penyimpangan

* Staf Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara

dalam pengelolaan keuangan negara dengan total penyimpangan berkisar Rp.16.485 triliun atau sebesar 66,31 persen dari total realisasi anggaran sebesar Rp.24.859 triliun.

Menurut **Prasetiantono (2000)** penyebab terjadinya penyimpangan keuangan negara, peluang kebocoran terbesar terletak pada pos pengeluaran pembangunan untuk proyek-proyek pemerintah di mana dananya berasal dari hutang CGI. Kebocoran terjadi pada proyek-proyek yang bersifat fisik, misalnya dalam pembangunan infrastruktur dengan melakukan penurunan spesifikasi atau kualitas pekerjaan sehingga tidak sesuai dengan yang dirancang dalam *blue book* yang diajukan pemerintah dalam setiap sidang CGI.

Menurut **Faisal Basri (2000)**, sikap *business as usual* termasuk di dalamnya perilaku untuk tetap menyelewengkan anggaran negara merupakan salah satu contoh bagaimana elite politik dan pejabat pemerintah saat ini tidak mau belajar dari pengalaman masa Orde Baru. Ini terjadi karena sekalipun presiden dan kabinetnya berganti tetapi pejabat dan birokrasi pemerintahnya masih tetap yang lama di mana secara mentalitas tetap mental Orde Baru yang sarat KKN.

Berbagai Pendapat Sebagai Solusi

Revrisond Baswir (2000) berpendapat bahwa penyelesaian awal dari indikasi adanya penyelewengan dana keuangan negara ini harus dimulai dengan melakukan redefinisi dari pengertian korupsi. BPK di dalam temuannya tidak pernah menyatakan sebagai korupsi tetapi menyebutnya sebagai inefisiensi, inefektivitas, kesalahan administrasi, dan sebagainya. Pengertian keliru tentang korupsi saat ini yang didefinisikan sebagai tindakan mengambil uang negara, harus dilihat lebih jauh dan lebih substansial. Artinya korupsi juga merupakan penyelewengan terhadap kepentingan negara, dan tidak selalu berkaitan dengan pengurangan keuangan negara sehingga solusinya adalah dengan mengembangkan hukum administrasi di mana dapat dilacak siapa yang paling bertanggung jawab berdasarkan kesalahan administrasi.

Satrio Budi Hardjojoedono (2000), sebagai ketua BPK berpendapat bahwa perlu perbaikan atas RUU Keuangan yang saat ini digodok DPR karena mempunyai potensi melanggengkan penyelewengan. Perbaikan tersebut karena dalam RUU tersebut ada prinsip yang diabaikan yaitu penyatuan antara prinsip administratif dan prinsip komptabilitas keuangan dalam mengelola keuangan negara. Prinsip tersebut perlu ada dalam RUU, karena jika dihilangkan maka tidak akan dapat dibedakan mana yang benar dan mana yang salah dalam pengelolaan keuangan negara. Prinsip komptabilitas sampai saat ini masih diatur terpisah yaitu dalam Indische Comtabiliteits Wet (ICW) Staatsblad 1925 nomor 448 sebagai UU Perbendaharaan negara yang diatur dalam UU nomor 9 tahun 1968.

Menurut **Prasetiantono (2000)**, untuk menangani penyimpangan dan kebocoran negara, pemerintah harus lebih ketat dalam mengajukan anggaran pembangunan. Selama ini, jumlah komitmen hutang dari CGI selalu konstan, yakni berkisar Rp. 5 milyar merupakan indikasi bahwa pemerintah kurang ketat dalam mengajukan anggaran sehingga berpeluang terhadap potensi penyelewengan realisasi dana anggaran. Solusinya pemerintah harus berani memangkas hutang baru CGI dan transparansi dalam *bluebook*.

Data Sekunder Laporan Penyimpangan Keuangan Negara

Temuan adanya penyimpangan keuangan negara yang dilaporkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, terlihat pada tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1
Rincian Penyimpangan Keuangan Negara
Pada tahun Anggaran 1999/2000 (dalam juta rupiah)

Sasaran Pemeriksaan	Ketertiban dan Ketaatan	Khematan dan efisiensi	Efektivitas
1. APBN			
Penerimaan :			
- Pajak	537,03		
- Migas	915.573,85		
- PNPB	38.525,85		9.837,79
Pengeluaran :			
- Belanja Negara	-		
- Belanja Rutin	2.538,87	2.571,40	2.323,19
- Belanja Pembangunan	10.895,88	13.598,05	12.345,58
Total	968.071,48	16.169,45	24.506,56
2. Non-APBN			
- Yanatera	64.886,09	13.927,29	46.427,30
- ONH Depag	76.442,20	248.815,18	29.549,32
- Yayasan TNI/Polri	100.896,67	6.500,00	258.731,30
- Komputerisasi Kasim Polri	150.895,62	7.937,76	69.073,48
Total Non APBN	393.120,58	277.180,23	408.691,40
3. Bank Indonesia			
BLBI *	138.442.026,00	-	-
1. APBD			
- Perhitungan APBD	196.503,06	18.334,50	336.662,37
- Pendapatan daerah	223.158,63	114,58	57.275,67
- Gaji Guru	18.414,66	2.949,71	51.943,15
Total APBD	438.076,35	21.398,79	445.881,19
2. BUMN			
- Tahun buku 1999	11.373.183,54	9.603.213,59	3.443.729,95
Total Penyimpangan (1+2+3+4+5)	151.614.477,95	9.917.962,06	4.317.808,10

Sumber : Badan Pemeriksa Keuangan, Oktober 2000

Keterangan : - * = Nilai BLBI yang disalurkan per 29 Januari 1999

- BLBI = Bantuan Likuiditas Bank Indonesia
- BUMN = Badan Usaha Milaik Negara
- APBD = Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- APBN = Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
- ONH = Ongkos Naik Haji

Temuan BPK ini menyangkut pemeriksaan keuangan negara yang ada di dalam APBN (berisikan posisi penerimaan dan pengeluaran pemerintahan pusat). Namun, yang diteliti bukan hanya APBN tetapi juga menyangkut dana non-APBN, yakni dana-dana yang pencatatannya ada di luar pos APBN. Juga ada pelaksanaan keuangan negara di luar hal itu, yakni di Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Bank Indonesia, dan di pemerintah daerah yakni pada APBD.

Pelaksanaan keuangan yang diperiksa BPK itu, menyangkut tahun anggaran 1999/2000, yang periodenya dimulai pada April 1999 hingga Maret 2000. Namun, nilai

keuangan yang diperiksa baru 29,10 persen, atau Rp.233.816 trilyun, dari yang seharusnya juga diperiksa. Itu berarti penyimpangan dapat terjadi ketika negara ini masih dipimpin Presiden BJ. Habibie, karena beliau digantikan Presiden Abdurrahman Wahid pada tanggal 20 Oktober 1999.

Selain itu, BPK juga menemukan penyelewengan pada pelaksanaan keuangan negara tahun anggaran 2000, dimulai bulan April 2000 sampai Desember 2000. Namun, pemeriksaan yang dilakukan pada tahun anggaran 2000 baru menyangkut periode Maret hingga September 2000.

Secara deskriptif, dari laporan temuan terklasifikasi hal-hal sebagai berikut:

1. Temuan yang terjadi berasal dari obyek yang diperiksa terdiri dari instansi Badan Pertanahan Nasional (BPN) menyangkut penerimaan negara bukan pajak (PNBP), Badan Urusan Logistik (Bulog) menyangkut kredit likuiditas Bank Indonesia (KLBI), Sekretariat Menko Polkam, Sekretariat Menko Kesra, dan sekretariat Meneg Perumkin untuk belanja rutin. Departemen Dalam Negeri menyangkut perhitungan anggaran dan inventarisasi kekayaan negara. Departemen Luar Negeri menyangkut belanja rutin di Direktorat Jenderal Hubungan Ekonomi Luar Negeri dan ASEAN.
2. Temuan yang berasal dari obyek TNI AD, TNI AL, TNI AU, dan Polri, serta unit Dephankam.
3. Temuan yang berasal dari Departemen Keuangan, yaitu dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), penerimaan pajak, dan bagian anggaran lainnya.
4. Temuan yang berasal dari Departemen Kehutanan dan Reboisasi, menyangkut perhitungan anggaran, penerimaan iuran hasil hutan (IHH) dan dana reboisasi (DR), serta pertanggungjawaban penggunaan IHH dan DR.
5. Temuan yang berasal dari pelaksanaan APBD, obyeknya adalah propinsi Sumut, Sumbar, Sumsel, Riau, Bengkulu, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara.
6. Temuan yang berasal dari BUMN, obyeknya adalah PT. Taspen, PT. Pelni, PT. Pelabuhan Indonesia II, PT Garuda Indonesia, PT. Indo Farma, PT. Kimia Farma, PT Industri Telekomunikasi Indonesia, PT Krakatau Steel, PT Kertas Leces, PT Perkebunan Nusantara II dan IV.

Perumusan Masalah

Penyimpangan keuangan negara tahun anggaran 1999/2000 yang ditemukan oleh BPK, dibagi atas tiga kategori yaitu:

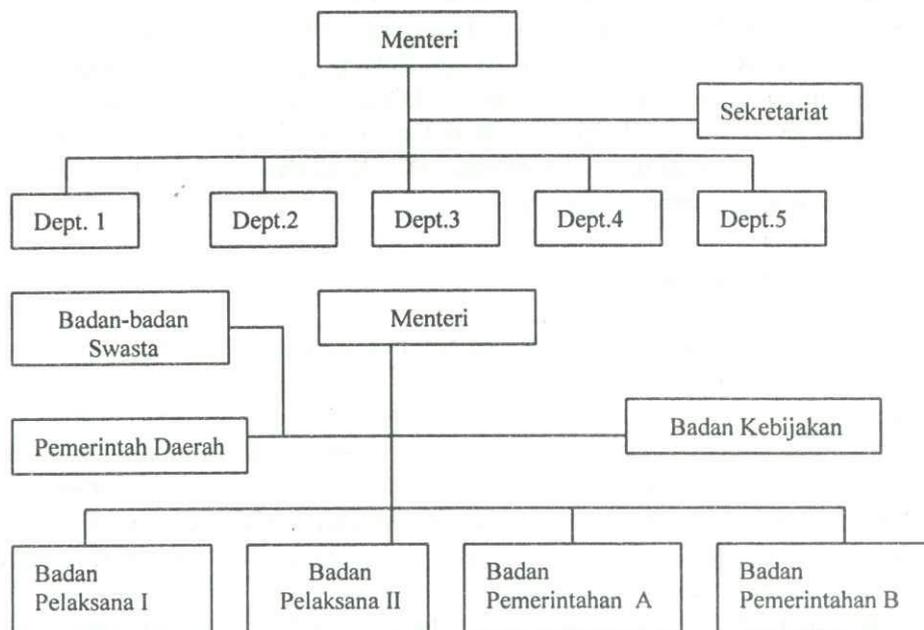
1. Ketertiban dan ketaatan pada perundang-undangan. Artinya adalah sejauh mana pemerintah taat dengan ketentuan hukum, seperti Keppres, peraturan pemerintah, dan tindakan instansi terkait dengan pemerintah. Tindakan yang dimaksud antara lain termasuk dalam pelaksanaan proyek tender atau pembelian barang untuk keperluan pemerintah, pelaksanaan tender apakah sesuai dengan aturan main, apakah pembelian barang dilakukan sesuai prosedur.
2. Kehematan dan efisiensi keuangan negara. Artinya adalah sejauh mana aparat pemerintah melakukan pembelian barang yang diperlukan. Apakah pembelian tersebut sesuai dengan harga yang sebenarnya. Dalam hal ini, BPK melakukan perbandingan harga-harga dengan langsung mengecek ke lapangan.
3. Efektivitas pencapaian sasaran. Artinya sejauh mana efektivitas sasaran dicapai dengan cara melihat selisih harga proyek yang terjadi.

Dari ketiga kategori yang menjadi faktor penyebab timbulnya penyimpangan keuangan negara tersebut, telah dilakukan analisis faktor untuk mengetahui tingkat korelasi di antara ketiga faktor tersebut, ada tidaknya multikolinearitas, dan faktor mana yang paling dominan pengaruhnya. Antisipasi penyelesaian berdasarkan skala prioritas selanjutnya dapat dilakukan dan dari simultan antar faktor apakah bersifat komplementer atau substitutif dapat ditentukan simultan kombinasi penyelesaiannya. Model Analisis faktor yang dipilih adalah *component analysis*.

Kerangka Teori

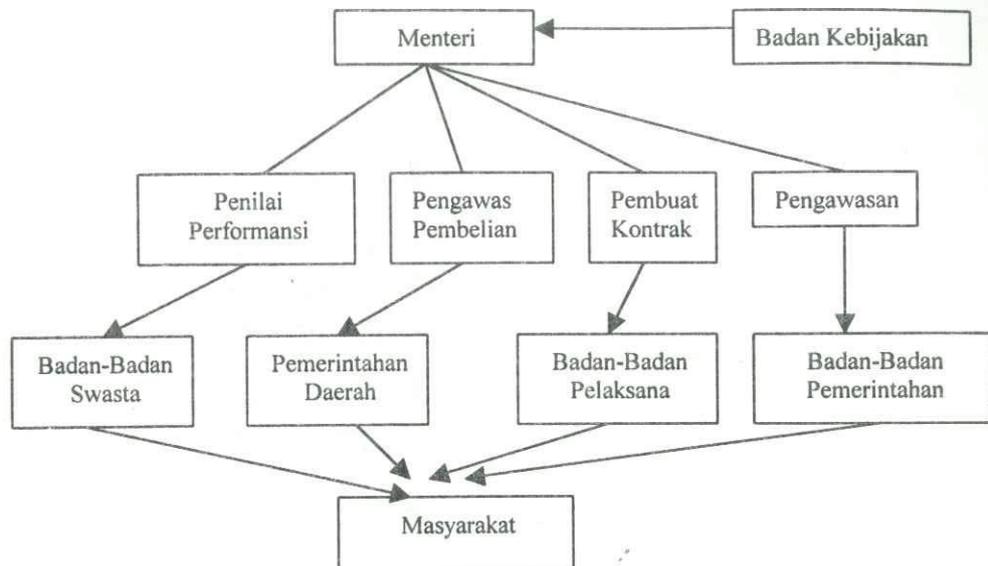
Deulf, Plenegen (1995) mendefinisikan keuangan negara sebagai pelaksanaan kebijakan fiskal suatu negara yang terklasifikasi atas sisi penerimaan negara dan pengeluaran negara yang didukung oleh perangkat struktur administrasi, sumber daya manusia, dan peraturan/hukum yang mengikat dan mengatur pelaksanaannya.

Booz, Allen & hamilton (2000) dalam hasil risetnya mengenai analisis keuangan negara menyatakan bahwa Indonesia perlu prioritas pada administrasi publik. Dasarnya ialah karena perubahan global menjadikan lembaga pemerintah menjadi lebih profesional dan bebas dari proses politik praktis. Saran dan konsultasinya bagi pemerintahan Indonesia sekarang, yaitu perlunya pembaruan aministrasi pemerintahan melalui restrukturisasi departemen untuk menjadi lebih ramping dan efisien, penegakan independensi, optimalisasi sumber daya dengan cara kesesuaian jumlah pegawai dengan kebutuhan deskripsi pekerjaan. Struktur Kementrian yang disarankan oleh *Booz, Allen & Hamilton* adalah seperti bagan berikut ini.



Gambar 1. Struktur Kementerian

Sumber : Booz Allen, & Hamilton, *Draft seminar "Pembenahan Administrasi Publik, Draft seminar 22 Mei 2000.*

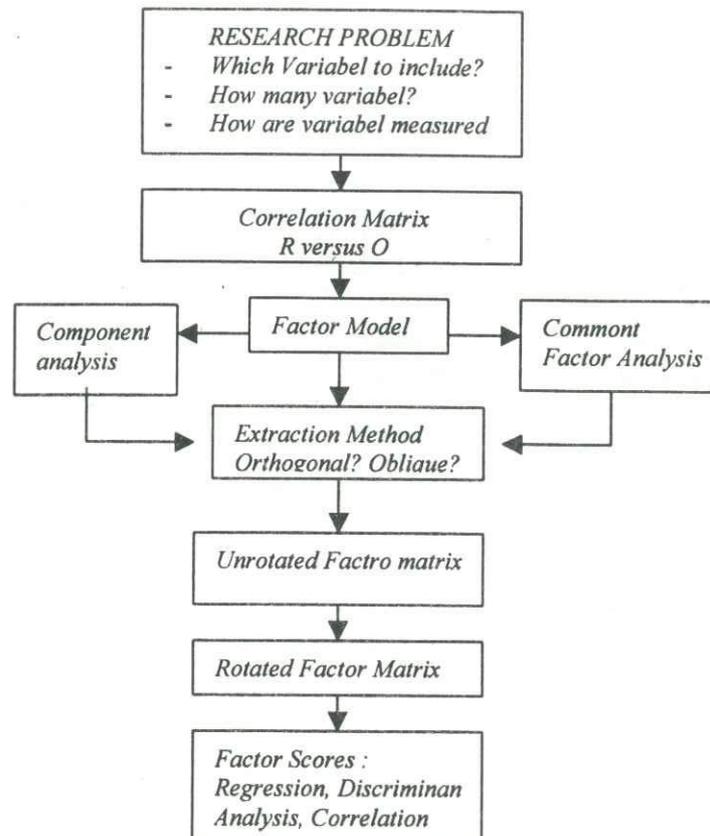


Gambar 2. Peran Kementrian

Sumber : Booz Allen, & Hamilton, Draft seminar "Pembenahan Administrasi Publik, Draft seminar 22 Mei 2000.

Pemilihan Model

Menurut *Hair, Anderson (1992)* analisis faktor adalah bagian dari metode statistik multivariat di mana tujuan utamanya adalah melihat interrelasi antar variabel. Interrelasi yang dianalisis dapat berupa korelasi (*canonical correlation*), signifikansi regresi multivariat, dan analisis diskriminan. Proses analisis dan pilihan model dalam analisis faktor dapat dijelaskan dalam diagram keputusan analisis faktor berikut ini.



Gambar 3. Diagram Keputusan Analisis Faktor
Sumber : Hair, Anderson (1992)

Model analisis faktor terdiri dari dua analisis, yaitu analisis komponen (*component analysis*) dan analisis faktor umum (*common factor analysis*). Pilihan model didasarkan atas tipe varian yang terdiri dari varian umum (*common variance*), varian unik (*unique variance*), dan varian kesalahan (*error variance*). Karena analisis komponen (*component analysis*) lebih menekankan pada interpretasi atas nilai korelasi (*correlation matrix*) maka model ini yang dipilih dalam analisis faktor terhadap penyimpangan keuangan negara tahun anggaran 1999/2000.

Hasil Pengolahan *Component Analysis*

Dari hasil olah data dengan menggunakan program komputer Statistik SPSS 10.01 dengan *input* variabel terdiri dari data variabel penyimpangan ketertiban dan ketaatan, variabel kehematan dan efisiensi, dan variabel efektivitas diperoleh hasil sebagai berikut:

a. Hasil *correlation matrix*

Correlation Matrix^a

		BOCOR1	BOCOR2	BOCOR3	SEKTOR
Correlation	BOCOR1	1.000	-1.000	-1.000	1.000
	BOCOR2	-1.000	1.000	1.000	-1.000
	BOCOR3	-1.000	1.000	1.000	-1.000
	SEKTOR	1.000	-1.000	-1.000	1.000

a. This matrix is not positive definite.

Keterangan : Bocor1 = Variabel penyimpangan ketertiban dan ketaatan
 Bocor2 = Variabel penyimpangan kehematan dan efisiensi
 Bocor3 = Variabel penyimpangan efektivitas

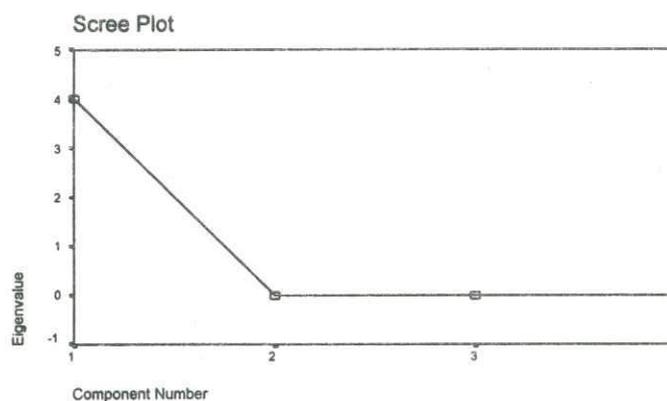
b. hasil diferensiasi komponen (*extraction of components*)

Total Variance Explained

Component	Initial Eigenvalues			Extraction Sums of Squared Loadings		
	Total	% of Variance	Cumulative %	Total	% of Variance	Cumulative %
1	4.000	100.000	100.000	4.000	100.000	100.000
2	6.555E-17	1.639E-15	100.000			
3	-1.77E-16	-4.42E-15	100.000			
4	-8.33E-16	-2.08E-14	100.000			

Extraction Method: Principal Component Analysis.

c. Grafik *Scree test* dari Analisis Komponen



Intepretasi Hasil Pengolahan Data Hasil *correlation Matrix*

Dari *correlation matrix* terlihat bahwa ketiga variabel penyimpangan keuangan negara tahun 1999/2000 mempunyai korelasi parsial sebagai berikut:

- a. Antara variabel penyimpangan ketertiban dan ketaatan dengan variabel penyimpangan kehematan dan efisiensi terdapat hubungan yang sangat kuat (*perfectly correlation*) dan negatif. Artinya jika penyimpangan ketertiban dan ketaatan seperti sejauh mana pemerintah taat dengan ketentuan hukum, misalnya Keppres, peraturan pemerintah meningkat akan diikuti dengan penurunan variabel penyimpangan Kehematan dan efisiensi keuangan negara seperti sejauh mana aparat pemerintah melakukan pembelian barang yang dia perlukan misalnya pembelian tersebut sesuai dengan harga yang sebenarnya.
- b. Antara variabel penyimpangan ketertiban dan ketaatan dengan variabel penyimpangan efektivitas pencapaian sasaran terdapat hubungan yang sangat kuat (*perfect correlation*) dan negatif. Artinya jika penyimpangan ketertiban dan ketaatan seperti sejauh mana pemerintah taat dengan ketentuan hukum, misalnya Keppres, peraturan pemerintah meningkat akan diikuti dengan penurunan variabel penyimpangan efektivitas pencapaian sasaran seperti sejauh mana efektivitas sasaran dicapai dengan cara melihat selisih harga proyek yang terjadi.
- c. Antara variabel penyimpangan kehematan dan efisiensi dengan variabel penyimpangan efektivitas pencapaian sasaran terdapat hubungan yang sangat kuat (*perfectly correlation*) dan positif. Artinya jika penyimpangan kehematan dan efisiensi keuangan negara seperti sejauh mana aparat pemerintah melakukan pembelian barang yang diperlukan, misalnya pembelian tersebut sesuai dengan harga yang sebenarnya meningkat akan diikuti dengan peningkatan variabel penyimpangan efektivitas pencapaian sasaran seperti sejauh mana efektivitas sasaran dicapai dengan cara melihat selisih harga proyek yang terjadi.

Hasil Differensiasi Komponen

Dari *eigenvalue* dapat diidentifikasi ada tidaknya multikolinieritas antar masing-masing variabel. Kriterianya ialah jika *eigenvalue* mendekati nol maka teridentifikasi bahwa korelasi ketiga variabel tersebut mempunyai multikolinieritas sehingga sebagai model dan hasil korelasi tidak signifikan untuk dijadikan dasar prediksi. Jika tetap dipaksakan untuk dijadikan dasar prediksi maka harus disembuhkan / dihilangkan dahulu multikolinieritasnya dengan cara ARIMA, penambahan data, dan cara lainnya. Dari hasil analisis terlihat bahwa *eigenvalue* dari ketiga variabel tersebut berdasarkan harga mutlak lebih besar dari satu sehingga dapat disimpulkan dari ketiga variabel tersebut tidak ada multikolinieritas.

Scree Test dari Analisis Komponen

Dari gambar *scree plot* terlihat bahwa batas ditolak dan diterimanya *eigenvalue* terletak pada nol dan banyaknya faktor atau variabel yang signifikan adalah dua variabel. Artinya korelasi secara parsial antar dua variabel dari masing-masing ketiga variabel tersebut secara statistik signifikan. Tetapi secara agregat korelasi antara ketiga variabel tersebut tidak signifikan karena faktor yang ditolerir oleh *latent root criterion* paling banyak adalah korelasi dua variabel.

Kesimpulan

Dari analisis faktor dengan menggunakan model analisis komponen terlihat bahwa antara faktor penyimpangan ketertiban dan ketaatan dengan faktor penyimpangan kehematan dan efisiensi terdapat korelasi yang sempurna dan negatif. Demikian juga antara faktor penyimpangan ketertiban dan ketaatan dengan faktor penyimpangan efektivitas pencapaian sasaran. Sebaliknya, antara faktor penyimpangan kehematan dan efisiensi terdapat korelasi yang sempurna dan positif dengan faktor penyimpangan efektivitas. Ketiga faktor tersebut secara statistik tidak mengandung multikolinearitas dan batas *eigenvalue* adalah maksimal korelasi dua faktor berdasarkan *latent root criterion*-nya.

Temuan adanya penyimpangan keuangan negara dalam anggaran tahun 1999/2000 oleh Badan Pemeriksa Keuangan seyogyanya tidak perlu dipolitisasi dan menjadi menu baru elit politik dalam mempopulerisasikan dirinya, partainya, atau pun kelompoknya yang terbukti selama ini berpengaruh negatif terhadap upaya pemulihan ekonomi. Yang perlu dikaji adalah substansinya, yaitu merupakan masukan yang baik untuk introspeksi, sehingga dapat dihindari kemungkinan terperosok ke kondisi yang makin krisis. Rakyat tidak mengharapkan banyak dari pemerintah. Dengan segala kreativitasnya, mereka mampu mencari jalan sendiri-sendiri untuk dapat tetap *survive*. Harus diakui pertumbuhan ekonomi yang terjadi sekarang ini sepenuhnya merupakan hasil kegiatan masyarakat termasuk pelaku usaha. Yang rakyat butuhkan hanyalah satu, yaitu Pemerintahan yang bersih, jujur, dan tidak mengkhianati mereka.

Daftar Pustaka

- Basri, Faisal (2000) Memprihatinkan, penyimpangan keuangan negara masih terus terjadi. Tajuk Rencana, *Kompas*, 28 Oktober.
- Baswir, Revisond (2000) Temuan BPK. Konfirmasi buruknya pengelolaan keuangan negara, *Kompas*, 28 oktober.
- Booz Allen & Hamilton (2000) Draft pembenahan administrasi publik, Makalah Seminar, 22 Mei.
- Deulf, Pleneg. (1995) *Pubic finance: Theory and application*. New York: Macmillan Publishing Company.
- Dillion, W.R., and M. Goldstein. (1984) *Multivariate analysis: Method and application*. New York: John Wiley & Sons.
- Gorsuch, R.L. (1983) *Factor analysis*, Hillsdale, N.J: Erlbaum.

SPSS, Inc., *SPSS User's Guide*, 7th ed. Chicago, 1999.

Hair, Joseph, and Anderson, Ralf, (1992) *Multivariate data analysis: with reading*, New York: Macmillan Publishing Company.

Tony A. Prasetyantono, BPK ingatkan kelemahan RUU Keuangan. *Kompas*, 28 Oktober 2000.

Satrio Budi Hardjojoedono, BPK ingatkan kelemahan RUU Keuangan, *Kompas*, 28 Oktober 2000.